

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Myanmar Terhadap Rohingya Periode 2012-2017”, secara garis besar membahas tentang kebijakan diskriminasi pemerintah Myanmar yang ditujukan pada etnis minoritas di Myanmar yaitu Rohingya. Kebijakan diskriminasi ini ditujukan untuk menghilangkan etnis Rohingya dari negara Myanmar yang disebabkan karena etnis Rohingya tidak termasuk kedalam daftar etnis resmi di Myanmar, sehingga Rohingya dianggap sebagai etnis illegal. Adapun kebijakan diskriminatif yang diberlakukan oleh pemerintah Myanmar diantaranya adalah: kebijakan penolakan kewarganegaraan, kebijakan pembatasan hak sosial yang meliputi pembatasan kebebasan untuk bepergian, pembatasan hak untuk menikah dan berkeluarga, dan pembatasan hak untuk beribadah. Selain itu, pemerintah Myanmar juga memberlakukan kebijakan pembatasan akses pendidikan, kesehatan, dan kebijakan pengusiran yang mengarah pada genosida hingga menyebabkan isu *ethnic cleansing*.

Kebijakan diskriminasi yang diberlakukan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya ini menyebabkan kecaman-kecaman dari dunia internasional. Salah satunya kecaman yang datang dari Majelis Umum PBB yaitu dengan mengeluarkan draft resolusi untuk segera menghentikan tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Namun, berbeda halnya dengan RRT. Sebagai salah satu negara yang memiliki hubungan cukup erat dengan Myanmar membuat RRT tidak

mempermasalahkan kebijakan tersebut untuk diterapkan dengan alasan demi menjaga stabilitas kawasan negara Myanmar itu sendiri.

Terlepas dari kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya, RRT sendiri dalam Kebijakan Luar Negerinya di bidang ekonomi pada umumnya menerapkan kebijakan One Belt One Road (OBOR). Kebijakan OBOR ditujukan untuk dapat menghubungkan daerah perbatasan RRT dengan negara-negara tetangga. Kebijakan itu dimaksudkan untuk dapat mengembangkan perekonomian di daerah perbatasan RRT. Selain itu, presiden Xi Jinping juga melakukan pendekatan hubungan antara RRT dengan ASEAN melalui Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 untuk mempromosikan kerjasama maritim antara RRT dan ASEAN. Kebijakan OBOR merupakan salah satu pilar Kebijakan Luar Negeri RRT di wilayah Asia Tenggara. Namun, pada kenyataannya kebijakan OBOR mencakup negara Myanmar. Sehingga, jika dikaitkan antara kebijakan OBOR dengan Kebijakan Luar Negeri RRT terhadap Myanmar adalah RRT membuat jalur akses energi yaitu jalur pipa minyak dan gas yang dibangun di Myanmar. Jalur pipa minyak dan gas ini merupakan bagian dari kebijakan OBOR. RRT beranggapan bahwa kebijakan OBOR mampu menjadi peluang potensial bagi RRT untuk mencapai kepentingan dalam mendapatkan sumber daya energi untuk dapat memenuhi kebutuhan energi minyak dan gas melalui pipa minyak dan gas tersebut.

Dalam Kebijakan Luar Negeri RRT di bidang politik, RRT memiliki lima prinsip dalam menjalankan kebijakannya. Prinsip tersebut diantaranya adalah: hidup damai secara berdampingan, menghormati kedaulatan dan integritas territorial, tidak ikut campur dalam permasalahan domestik sebuah negara, menjalin kerjasama dengan negara-negara berkembang, serta menjalin kerjasama

multilateral. Kebijakan Luar Negeri politik RRT terhadap Myanmar terkait isu Rohingya, RRT memilih untuk tidak mengintervensi permasalahan tersebut. RRT hanya mendukung kebijakan tersebut melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT. Selain itu, RRT lebih menghargai tindakan Myanmar dalam menyelesaikan permasalahan negaranya sendiri. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan citra RRT di mata Myanmar dan untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara. Di sisi lain, dukungan yang diberikan RRT terhadap Myanmar adalah untuk menggeser pengaruh AS dalam mencapai kepentingan Luar Negerinya.

Dapat kita ketahui bahwa RRT dan Myanmar cukup banyak menjalin kerjasama terutama bidang ekonomi dan politik. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa Myanmar merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki cadangan energi alam dan gas yang mencukupi. RRT merupakan salah satu negara yang memiliki keterbatasan energi sehingga RRT memanfaatkan sumber daya energi dan gas Myanmar untuk dapat memenuhi kebutuhan RRT dalam jangka waktu yang panjang. RRT memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri terhadap Myanmar. Kepentingan tersebut dibagi dalam dua bidang yaitu ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, RRT memiliki kepentingan seperti pertambangan dan pembangkit tenaga listrik. Namun, yang menjadi kepentingan utama RRT di Myanmar khususnya di wilayah Rakhine adalah proyek pipa minyak dan gas yang menghubungkan wilayah kedua negara. Proyek pipa ini dimulai dari pelabuhan Kyauk Phyu hingga ke wilayah Kunming, RRT.

Kemudian, kepentingan utama RRT dalam bidang politik adalah untuk mengambil alih kekuasaan dan mendominasi kekuasaan di negara Myanmar. RRT

juga mencari dukungan Myanmar terhadap posisinya dalam sengketa Laut China Selatan pada forum regional KTT ASEAN yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Myanmar. Konflik Rohingya yang terjadi di wilayah Rakhine merupakan sebuah hambatan bagi RRT karena konflik tersebut dapat menghambat proses pembangunan proyek pipa minyak dan gas yang merupakan kepentingan utama RRT di Myanmar.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dengan menggunakan *Rational Choice Theory* yang pertama kali dipopulerkan oleh James S. Coleman pada tahun 1989, dukungan yang diberikan oleh RRT terhadap kebijakan pemerintah Myanmar dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan pada dua variabel yaitu *cost and benefit*. Selain itu, peneliti juga menggunakan hambatan-hambatan dalam menerapkan RCT kedalam analisis. Sehingga, dari hasil analisis ini peneliti menemukan jawaban untuk menjawab rumusan masalah.

- *Cost*

*Cost* dalam analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan RRT untuk mendapatkan kepentingannya di Myanmar. Dalam strategi yang digunakan RRT adalah RRT mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya karena dianggap paling minim resiko dibandingkan dengan strategi lainnya. Pada strategi ini, peneliti menemukan bahwa resiko yang didapatkan hanyalah berupa kritikan secara tidak langsung oleh AS. Kritikan tersebut dikeluarkan oleh AS lantaran RRT dianggap telah melindungi Myanmar dari sanksi PBB.

- *Benefit*

Adapun *benefit* yang dirasakan oleh RRT dalam bidang ekonomi, RRT telah melakukan MoU dengan Myanmar terkait proyek besar pembangunan pipa minyak dan gas yang dibangun di Myanmar dan telah disepakati oleh kedua negara. Sedangkan keuntungan yang dirasakan dalam bidang politik RRT telah berhasil mendominasi pengaruhnya di Myanmar. Hal ini terbukti ketika kecaman yang dikeluarkan oleh AS terkait isu Rohingya membuat Myanmar berpaling dari AS dan memilih lebih mengeratkan hubungannya dengan RRT. Selain itu, Myanmar juga telah mendukung posisi RRT dalam sengketa Laut China Selatan pada forum regional ASEAN di Myanmar tahun 2014 silam.

- Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh RRT dalam menjalankan kepentingan proyek pipa minyak dan gas.

Adapun hambatan-hambatan yang didapat oleh RRT dalam menjalankan proyek pipa minyak dan gasnya di Myanmar yaitu pembengkakan biaya serta munculnya ancaman dari negara India. Hambatan ini dirasakan oleh RRT karena sangat mempengaruhi jalannya proyek pipa minyak dan gas menjadi terhambat akibat hambatan-hambatan yang muncul.

Dalam skripsi ini, telah membahas dan menganalisis tentang analisis kepentingan RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya, akan mempermudah RRT untuk mendapatkan kepentingan-kepentingannya di Myanmar. Kepentingan-kepentingan RRT di Myanmar terbagi ke dalam dua bidang

yaitu bidang ekonomi politik. Penulis berharap bahwa akan ada penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas dari bidang yang berbeda.